

ISSN 2338-1299

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Volume II. No.2 Januari-Desember 2014

Kontekstualisasi Politik Islam dalam Kebinekaan di Indonesia

Sekilas Tentang Teori-Teori Realisme Amerika

Membangun Partisipasi Pemilih
untuk Menggunakan Hak Suaranya

Konfigurasi Politik Hukum Perdata BW
dan Politik Hukum Islam di Indonesia

Politik Hukum Penegakan Keadilan Melalui
Bantuan Hukum di Indonesia

Syarat dan Prosedur Poligami
(Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Fiqh Islam serta
Realitasnya di Masyarakat)

Pergumulan antara Kelompok Liberal dan Konservatif
dalam Politik Hukum Islam di Tunisia

Penelitian Hukum Islam dengan Pendekatan Sejarah

Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an
(Suatu Kajian Tafsir Tematik)

Diterbitkan Oleh:

Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI)
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

AS-SAA'IS

As-saa'is merupakan sebuah jurnal hukum tata negara islam yang diterbitkan oleh jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI) Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara.

Dr. Muhammad Habibi Siregar mencurahkan pemikirannya di dalam jurnal ini pada terbitan Volume II. No.2 Januari-Desember 2014. Dengan judul Kontekstualisasi Politik islam dalam Kebinekaan di Indonesia, sebagai Key words tentang: Politik, Syariah, Demokrasi, Budaya Lokal, dan Indonesia Muslim.

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Pimpinan Umum
Saidurrahman

Ketua Penyunting
Fatimah

Penyunting Pelaksana
Syafuruddin Syam

Penyunting Ahli
Nawir Yuslem (IAIN Sumatera Utara)
Muhammad Iqbal (IAIN Sumatera Utara)
Ansari (IAIN Sumatera Utara)
Ibrahim Siregar (STAIN Padangsidempuan)

Sekretariat:
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan
e-mail : Syafanikiya@gmail.com.

DAFTAR ISI

Muhammad Habibi Siregar

Kontekstualisasi Politik Islam dalam Kebinekaan di Indonesia [1-18]

Abd. Muksin

Sekilas Tentang Teori-Teori Realime Amerika [19-33]

Khalid

Membangun Partisipasi Pemilih untuk Menggunakan Hak Suaranya dalam Pemilu [35-44]

Mhd. Yadi Harahap

Konfigurasi Politik Hukum Perdata BW dan Politik Hukum Islam di Indonesia [45-59]

Budi Sastra Panjaitan

Politik Hukum Penegakan Keadilan Melalui Bantuan Hukum di Indonesia [61-77]

Ramadhan Syahmedi Siregar

Syarat dan Prosedur Poligami (Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan Fiqh Islam serta Realitasnya di Masyarakat) [79-93]

Budi Juliandi

Pergumulan antara Kelompok Liberal dan Konservatif dalam Politik Hukum Islam di Tunisia [95-117]

Sukiati

Penelitian Hukum Islam dengan Pendekatan Sejarah [119-131]

Mahyuddin

Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik) [133-147]

KONTEKSTUALISASI POLITIK ISLAM DALAM KEBINEKAAN DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Habibi Siregar

(Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Sumatera Utara, menyelesaikan
Program Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ABSTRAK

There is a passion to bring the spirit of Indonesian Islam in Indonesia Islam not see the fact that there is an understanding to appreciate local values that have existed thousands of years before the arrival of Islam. In fact, in many ways can be seen in Indonesian Islam better accommodate differences compared with the early spread of Islam in the center of the Middle East. The character of Islam in Indonesia, accommodating and trying to maintain the activities of local wisdom regarded as a fortress to defend the Indonesian Muslim identity. In Indonesia, the figure of Muslims began to realize how local values embodied in traditional rituals activities must be maintained to provide a place for Islam dwells in Indonesian society.

Ada semangat untuk memunculkan spirit *Indonesian Islam not Islam in Indonesia* melihat kenyataan bahwa ada pemahaman untuk menghargai nilai-nilai lokal yang sudah eksis ribuan tahun terlebih dahulu sebelum kedatangan Islam. Faktanya, dalam banyak hal dapat dilihat Islam di Indonesia lebih mengakomodir perbedaan di banding dengan Islam di pusat awal penyebarannya di Timur Tengah. Karakter Islam di Indonesia yang akomodatif dan berusaha mempertahankan kegiatan-kegiatan kearifan lokal dianggap sebagai benteng untuk mempertahankan identitas muslim Indonesia. Di Indonesia, kalangan figur umat Islam mulai menyadari betapa nilai-nilai lokal yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan ritual adat harus tetap dipertahankan untuk memberi tempat bagi Islam bersemayam di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Syariah, Demokrasi, Budaya Lokal, dan Indonesian Muslim.

A. Pendahuluan

Fakta Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim di dunia memiliki dimensi lain potret Muslim skala global. Berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya di Timur Tengah yang dianggap sebagai pusat awal lahir Islam lebih banyak memiliki

pengalaman sejarah dengan umat Nasrani, dan Yahudi. Muslim di Indonesia relatif kompleks karena bukan hanya harus melakukan penyesuaian dengan ajaran animisme maupun dinanisme yang merupakan kepercayaan awal masyarakat lokal di Indonesia juga melakukan adaptasi dengan agama Hindu Budha yang terlebih dahulu eksis.¹

B. Muslim Indonesia di Alam Kebinekaan.

Secara kultur walaupun Indonesia mayoritas Muslim, akan tetapi secara dinamika yang berbeda dengan Muslim di Timur Tengah sehingga menampilkan refleksi yang berbeda dalam mengejawantahkan Islam. Pengalaman heterogenitas masyarakat Indonesia selama ini membuat Islam di Indonesia menampilkan bingkai yang berbeda terutama yang berkaitan dengan penerimaan terhadap perbedaan.² Islam nusantara dalam praktek budaya di masyarakat lebih banyak melakukan adaptasi terhadap budaya lokal yang sudah ada yang diwujudkan dalam praktek-praktek ritual adat.

Wilayah profan dan sakral merupakan dimensi yang sulit dibuat batasan yang jelas dalam suatu ritual keagamaan, sehingga dalam banyak hal praktek sinkretisme ritual adat dengan ajaran Islam banyak ditolak oleh kalangan puritan di internal Islam.³ Adanya *tension* (ketegangan) yang terjadi pihak-pihak yang mengatasnamakan puritanisme Islam yang banyak terpengaruh oleh pola keagamaan dari Timur Tengah terutama pengaruh Wahabia menimbulkan dilema tersendiri. Puritanisme yang mengatasnamakan pemurnian ajaran Islam di satu sisi mendapat simpati dari masyarakat Islam yang menganggap diri mereka sebagai golongan intelektual juga mendapat tantangan yang cukup kuat dari masyarakat Islam lainnya. Bagi pihak yang ingin mempertahankan kekhasan Islam di Indonesia mereka menganggap gerakan puritanisme adalah kedok dari penetrasi pemikiran Wahabi yang ingin melakukan intervensi terhadap perkawinan antara Islam dengan budaya lokal.⁴

Sejarah panjang Islam di Indonesia yang melakukan sinkretisme budaya antara ritual keagamaan dengan Islam merefleksikan gambaran watak bangsa Indonesia yang sangat terbuka menerima pengaruh dari luar. Islam nusantara yang sangat plural dengan akar budaya masing-masing dalam hal tertentu mendapat tantangan yang cukup serius dengan munculnya Islam puritan yang berdakwa secara intens selain dengan lembaga-lembaga yang telah disebutkan juga melakukan dengan media televisi. Banyak televisi yang terafiliasi dengan ajaran Islam puritan membuat tantangan sendiri di dalam masyarakat Islam nusantara, dalam beberapa hal telah menimbulkan friksi di kalangan Islam Nusantara.

¹ Nader A Hashemi, *Inching Towards Democracy: Religion and Politics in Muslim World, Third World Quarterly* issue 3 (June 2003), h. 563-578.

² Ibnu Anshori, "Mustafa Kemal and Sukarno": Comparison of View Regarding Relation Between State and Religion." *Master Abstract International* issue 02 Vol. 34 (April 1996), h. 547.

³ David Pinault, *Commonweal*, "Pray Only to Allah." Vol. 139 issue 16 *Data Base: Literary Reference Centre* (September 2012), h. 8-10.

⁴ Madinier, Remy and the others, *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religion Contention in Java and Bali.* Routledge Contemporary Southeast (2011): h. 23-28.

Uniknya, masyarakat Islam di Indonesia juga menghadapi pengaruh budaya Barat yang cukup besar disamping pengaruh dari tetangganya dari Cina.

Seseorang yang memiliki organisasi tertentu sangat mudah untuk pemikiran sosial keagamaan atau politiknya, karena umat Islam Indonesia cenderung untuk membentuk kelompok tertentu dalam mengekspresikan identitas mereka.⁵

C. Dari Politik Menuju Institusionalisasi Agama

Konsekwensi dari tekanan atmosfer politik dan budaya dari luar memaksa masing-masing kelompok masyarakat mengikatkan diri mereka dalam satu wadah sosial yang bisa mendukung di antara mereka. Polarisasi masyarakat nusantara biasanya tergabung pada wadah ideologi, etnis, profesi, maupun minat. Wadah kelompok masyarakat yang tergabung di dalam ideologi merupakan kelompok yang memiliki doktrin untuk ekspansi dalam mencari pengaruh yang lebih besar.

Wadah ideologi ini yang sangat berpotensi terjadinya *clash* di antara kelompok masyarakat yang biasanya ketika sudah besar berubah menjadi kekuatan politik. Fakta banyaknya organisasi ideologi sosial yang berubah menjadi kekuatan politik baik secara formal juga informal. Organisasi Muslim lokal yang paling besar NU dan Muhammadiyah tampaknya sudah mulai menarik diri untuk terjun ke dalam politik praktis secara formal yang mengatasnamakan organisasi akibat dari pengalaman sejarah Indonesia yang tidak memihak.⁶ Beberapa usaha dengan kekuatan senjata untuk merubah konstitusi Indonesia ke syariat Islam gagal, bahkan organisasi massa Islam yang terjun ke dunia politik baik itu; NU, Muhammadiyah, maupun Masyumi tidak berhasil mendapatkan simpati masyarakat Islam nusantara untuk merubah dasar negara Indonesia pancasila. Hal tersebut menggambarkan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang inklusif karena umat Islam sebagai mayoritas lebih memilih menempuh jalur sekuler.

Pengalaman sekulerisme sebuah negara tidak bisa dijadikan alat untuk melakukan evaluasi ke negara lain, artinya tidak semua pengalaman negara sama terhadap sekulerisme itu sendiri. Kecenderungan sekulerisme di Turki untuk lebih dekat dengan Islam tampak dengan diubahnya beberapa peraturan yang menampar wajah sekularisme di Turki, seperti dicabutnya larangan jilbab di gedung-gedung pemerintahan baik itu pendidikan maupun perkantoran.⁷

Bahkan istri perdana menteri dan beberapa petinggi Turki mengenakan jilbab. Keberhasilan Turki yang tumbuh mengesankan di tengah ekonomi ekonomi Eropa yang

⁵ Mark Woodward, *Java, Indonesia and Islam in Muslim Global Series* (Dordrecht: Springer, 2010), h. 30-40.

⁶ Olle Tornquist, *Dynamic of Indonesia Democratization*, *Third World Quarterly* (June 2000, h. 383-423).

⁷ Semiha Topal, 'Every Body Wants Secularism': But Which One? Contesting Definitions of Secularism in Contemporary Turkey, *International Journal of Politics, Culture and Society* 25. 1-3, September 2012, h. 1-14.

mengalami krisis menimbulkan kepercayaan yang cukup signifikan diberikan kepada partai AKP (partai penguasa) yang islamis ini.⁸ Di samping itu, sejarah gemilang pada masa kerajaan Turki Usmani memberikan psikologi nostalgia bagaimana Islam sangat melekat dengan kejayaan bagi bangsa Turki.

Berbeda dengan negara Indonesia yang mayoritas Muslim, akan tetapi sejarah gemilang yang telah dicapai ketika kerjaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menjadi negara adikuasa pada masanya. Sriwijaya yang identik dengan agama Budha serta Majapahit dengan agama Hindu memberikan tempat tersendiri di dalam sanubari rakyat Indonesia. Sementara itu, ketika negara-negara Eropa datang khususnya Portugis dan Belanda kerajaan Islam yang eksis menggantikan kerajaan Hindu dan Buddha tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka untuk mempertahankan tanah nusantara. Kerajaan Islam nusantara yang tersebar tidak mampu melawan negara-negara penjajah Eropa sehingga Belanda dapat menjajah selama 3,5 abad lamanya. Imperior kerajaan Islam dalam melawan bangsa Eropa meninggalkan perasaan yang kurang berkesan Islam sebagai kekuatan politik di nusantara.

Ketika kelompok elit masyarakat Indonesia menggunakan label Islam dalam politik yang muncul adalah apriori karena pengalaman sejarah yang pahit Islam sebagai kekuatan politik. Masa depan partai politik di Indonesia tidak sebagai dengan di negara-negara mayoritas Muslim lainnya akibat tidak adanya kebanggaan Islam sebagai kekuatan politik pada masa lalu. Pasca reformasi 1998, tidak pernah ada satupun partai Islam yang bisa mengungguli partai nasionalis bahkan partai-partai Islam selalu berada di posisi buncit. Apalagi dalam memberlakukan syariat Islam mulai dari penerapan undang-undang dasar saja piagam Jakarta yang memuat tentang syariat Islam tidak jadi diterapkan karena besarnya resistensi dari masyarakat Muslim itu sendiri. Sejarah keharmonisan antara kerajaan-kerajaan sebelum Islam yang tidak pernah ada *clash* yang berdasarkan teologis menunjukkan bagaimana masyarakat nusantara telah lama belajar tentang kerukunan. Pemberlakuan syariat Islam secara formal dianggap dapat mengganggu keharmonisan yang telah dibangun selama berabad-abad lamanya. Islam nusantara seperti tidak mungkin bisa berubah menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara secara formal karena selain tidak memiliki landasan sejarah politik yang mapan di dalam masyarakat juga adanya anggapan ancaman sosio kultural masyarakat lokal.⁹

Indonesia adalah negara Muslim yang pertumbuhan gerejanya sangat pesat selama tiga puluh tahun, juga salah satu pusat konsentrasi agama Buddha di Asia Tenggara. Di Indonesia juga terkenal dengan Bali selain sebagai tempat pariwisata yang terkenal juga mayoritas agama Hindu yang dianut penduduknya yang tetap memelihara tradisi ritual

⁸ Sevim Kalyoncu, *The Veiling Issue, Official Secularism and Popular Islam in Modern Turkey*, *Journal of Muslim Minority Affairs* 19.2, October 1999, h. 346-347.

⁹ Robert Hefner, *Multifarious Modernities: Christianity, Islam, and Hinduism in Globalizing Age*. "Annual Review of Anthropology 27, 1998, h. 83-104.

keagamaannya hingga kini. Hampir tidak dijumpai di negara Muslim manapun heterogenitas agama dan masyarakat tumbuh berkembang yang dalam beberapa hal melakukan kontak adaptasi dengan ajaran Islam.

Wajah Islam nusantara lebih banyak mencerminkan penyatuan heterogenitas entitas dalam bingkai sekularisme yang telah diadaptasi dengan realitas masyarakat. Merupakan suatu kemustahilan untuk menampilkan bentuk warna Islam seperti di negara-negara Arab yang lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kesinambungan pertentangan ideologi pada masa lalu. Cap Sunni dan Syiah hampir tidak begitu terasa selama ini kecuali ketika terjadi pergesekan aktivis puritanisme yang mengangkat isu Syiah sebagai masalah sektarian yang membahayakan.¹⁰ Padahal wilayah Persia juga termasuk yang berperan dalam menyebarkan Islam ke nusantara, akan tetapi akibat penetrasi aliran puritanisme yang telah mendapatkan pengaruh di Indonesia membuat pengusiran anggota Syiah di samping bisa terjadi.¹¹ Sebenarnya Islam nusantara tidak pernah memiliki masalah dengan dikotomi Sunni maupun Syiah sebab dikotomi ini muncul di Timur Tengah yang telah banyak menghabiskan energi besar umat Islam. Tampak aneh juga bila melihat perkembangan beberapa tahun ini banyak tumbuh sikap intoleran kepada sesama internal umat Islam yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Realitas Indonesia selain jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, juga pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi membuat posisi negara ini semakin penting dalam percaturan geopolitik di tingkat internasional. Menjadi suatu hal yang lumrah bila semua kekuatan utama berusaha untuk menancapkan pengaruhnya di negeri ini, dalam konteks sekularisasi negara-negara Barat tentunya sangat berkepentingan agar negara ini tetap dipimpin oleh sosok sekuler bukan kalangan islamis. Hal tersebut bukan saja akan menimbulkan distabilisasi di kawasan juga kurang menguntungkan dalam banyak sisi, politik maupun ekonomi.¹²

D. Islam Indonesia: Antara Formalisasi dan Substansiasi

Formalisasi syariat Islam tampaknya sangat jauh dari kenyataan selain pengalaman sejarah yang kurang mendukung juga kondisi ril masyarakat Indonesia mayoritas lebih nyaman dengan kondisi sekuler. Walaupun selalu ada kekuatan dari internal umat Islam yang berusaha untuk melakukan formalisasi syariat Islam terbukti banyaknya bermunculan Perda syariat di daerah-daerah akibat dari otonomi. Akan tetapi, Perda syariat yang selama ini ada lebih banyak untuk pencitraan untuk masyarakat demi kepentingan politik. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat bukan hanya sekedar *lip service* semata tetapi dengan melakukan pembenahan di segala lini untuk menampilkan pemerintahan yang bersih yang

¹⁰ Hary C Triandis, *Culture and Self – Deception : A Theoretical Perspective.* " *Social Behavior and Personality* 39.1, 2011, h. 3-13.

¹¹ Robert Hefner, *Global Violence and Indonesian Muslim Politics: American Anthropologist* 104.3, September 2002, h. 754-765.

¹² Doran C French, *Urip Purwono and the Others, "Friendship and Religiosity of Indonesian Muslim Adolescents."* *Journal of Youth and Adolescence* 40.12 (December 2011): h. 1623-1633.

bisa memakmurkan masyarakat. Kenyataan dalam kurun 5 tahun keberadaan KPK telah ditahan lebih dari 100 kepala daerah. Bagi masyarakat Indonesia *tagline* pemberlakuan syariat Islam di dalam konstitusi kurang begitu laku dijual karena hal tersebut tidak masalah yang penting karena masyarakat sudah nyaman dengan system sekuler seperti selama ini. Mereka lebih menginginkan adanya perbaikan ekonomi maupun politik demi kemakmuran bangsa dan negara.

Untuk memahami karakter Muslim Indonesia tentunya tidak hanya dengan melihat jumlah masjid, ataupun banyaknya jamaah haji yang pergi ke Makkah setiap tahunnya. Akan tetapi, dilihat ikatan yang mengikat *diversity* yang ada di Indonesia dengan ikatan psikologi sejarah sebagai satu bangsa dibawa oleh kerajaan besar nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit.¹³ Islam sebagai ikatan pemersatu tampaknya hanya dalam tataran normative, fakta membuktikan ketika terjadi invasi penjajahan Belanda di nusantara hampir tidak ada persatuan yang tercipta antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya. Bahkan terkadang satu kerajaan Islam berkolaborasi dengan Belanda untuk menghadapi kerajaan Islam lainnya. Hal tersebut menandakan ikatan Islam sebagai pemersatu masyarakat kurang terbukti malah yang lebih memberikan efek yang lebih ketika semangat kebangsaan dijadikan sebagai *tagline* persatuan di antara masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia tanpa ada intervensi politik sekalipun lebih condong untuk melakukan proses sekularisasi secara alami. Artinya prinsip sekularisasi dianggap sebagai kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masyarakat Perancis yang melakukan sakralisasi prinsip sekuler sehingga menciptakan agama baru dalam bentuk formalisasi sekularisasi. Ketika prinsip sekularisasi menghalangi orang untuk menampilkan identitasnya seperti dalam bentuk pelarangan pemakaian hijab. Padasarnya prinsip kebebasan yang diagungkan dalam sekularisasi sudah hilang yang ada lahirnya bentuk kekultusan otoriter baru walaupun dengan nama yang manipulatif.¹⁴ Ketegangan terus menerus antara mempertahankan prinsip sekularisasi dan dorongan formalisasi syariat Islam di Indonesia wajah hukum di Indonesia menampilkan bentuk yang unik. Terbentuknya undang-undang perkawinan, zakat menimbulkan tafsiran sekularisasi ala Indonesia yang mengakomodir hukum Islam terutama yang dapat mengatur ketertiban masyarakat. Kalangan akademisi Muslim di Indonesia telah menyadari bahwasanya Islam sangat tidak mungkin untuk menerapkan syariat Islam secara vulgar karena itu perlu adanya politik hukum yang cermat.¹⁵ Politik hukum yang dimaksudkan di sini ialah dengan melakukan kontekstualisasi secara legal aturan-aturan hukum Islam yang sudah baku.

Langkah yang dilakukan oleh legislator Muslim dengan mempelajari materi tertentu dari hukum Islam yang tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat secara umum. Tentu

¹³ Marilyn Porter, Tita Marlita Hasan, *Exploring in Narrative Research : Indonesian Study*, *The Canadian Review of Sociology and Anthropology* 40.2, May 2003, h. 153-170.

¹⁴ Murial Mc Gregor, *Letter: Religious Freedom is not Denial of Secularism* (Carlsbad: University Wire, 2004, h. 24-29.

¹⁵ Hafiz Abdul Ghani, "Condition of Valid Custom in Islamic and Common Laws." *International Journal of Business and Social Science* 3.4, February 2004.

tidak mungkin memasuk hukum potong tangan ataupun rajam ke dalam konstitusi Indonesia atau paling tidak dalam waktu dekat ini. Hukum zakat walaupun telah diundangkan pada tahun 2000 sampai saat ini tidak pernah diimplementasi karena menimbulkan efek hukum yang sangat besar. Artinya akuntan di Indonesia tentunya harus mengerti tentang hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, sementara itu tidak semua akuntan beragama Islam dan walaupun ada yang Muslim agak repot harus mempelajari lebih detail tentang hukum zakat tentunya.

Pengalaman penetapan hukum zakat yang dinilai tidak efektif juga dapat dilihat pemberlakuan undang-undang pornografi dan aksi menimbulkan pro kontra di seluruh pelosok negeri yang dianggap sangat memihak kepada kalangan Islam. Adanya pesan sponsor kalangan Islamis melalui jalur parlemen dianggap melanggar prinsip inklusivisme di dalam konstitusi. Fakta maraknya kejahatan seksual kepada anak-anak (Paedofelia) tidak serta merta masyarakat mau beralih kepada hukum Islam yang di dalamnya terdapat hukum rajam maupun jilid bagi pelaku kejahatan seksual. Malah kalangan berwenang di Indonesia menjadikan Barat sebagai kiblat hukum untuk menjatuhkan hukuman kebiri.¹⁶ Seakan hukum Barat selalu identik dengan keadilan, andai rujukan hukum mengarah kepada hukum Islam tentunya akan menimbulkan gejolak yang hebat terjadi di dalam masyarakat. Ada paradigma yang sudah melekat di dalam sanubari masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam hanya mengatur di wilayah individu bukan publik. Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap Islam lebih banyak pada level teologi dan hukum-hukum tertentu yang mengatur masalah-masalah domestik seperti perkawinan, talak, maupun waris. Artinya Islam harus berbagi tempat dengan hukum-hukum lain yang tumbuh di dalam masyarakat, baik itu hukum lokal maupun hukum sekuler. Sepertinya hukum sekuler dianggap sebagai hukum utama yang menjembatani antara hukum lokal dengan sekuler karena dianggap tidak memihak sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat yang heterogen.

Kalangan islamis tentunya memiliki agenda tersendiri agar hukum Islam yang dianggap baku dapat diterima di dalam konstitusi negara. Permasalahan klasik instalasi hukum Islam ke dalam konstitusi negara tidak jarang ingin menampilkan dalam bentuk terang-terangan sehingga langkah tersebut dapat menyulut permusuhan bagi pihak yang kontra.¹⁷ Jualan ideologi partai nasionalis untuk tetap menjaga ideologi pancasila kepada masyarakat tanpa disadari menyebarkan asumsi bahwasanya bahaya laten islamisasi konstitusi Indonesia. Ketika ideologi komunis yang dianggap tidak mungkin lagi bangkit tetapi partai-partai nasionalis tetap saja menjual jargon menjaga ideologi pancasila yang secara tidak langsung tertuju pada kekuatan-kekuatan politik berbasis Islam. Dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dari 11 partai yang ikut pemilihan hanya satu partai yang mengusung Islam sebagai azas. Akan tetapi, mengalami kekalahan di urutan paing buncit

¹⁶ Lydia Smith, *Consider the Impact of Rape on Child : Paedophiles must Spend longer in Jail*. (London: Open Democracy, 2012), h. 19-23.

¹⁷ Christopher A Callaway, *Keeping Score : The Consequential Critique of Religion*, (*International Journal for Philosophy of Religion* 70.3: December 2011), h. 231-246.

dan tidak lolos *threshold electoral* 4 persen yaitu PBB yang hanya mendapatkan 1,7 persen. Hal tersebut menggambarkan bagaimana isu Islam sebagai azas berpolitik di Indonesia tidak laku karena masyarakat lebih mementingkan isu-isu yang dianggap lebih populis.

Bagi seorang Muslim umumnya meyakini bahwasanya Islam adalah ajaran yang paling lengkap dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Hal itu menimbulkan dilema tersendiri di kalangan umat Islam untuk hidup dalam syariat Islam yang diridhoi oleh Allah sehingga muncul islamisasi institusi.¹⁸

Semangat yang berlebihan bahwasanya Islam adalah agama paripurna yang dapat mengatasi segala masalah di dalam hidup ini mengalami benturan dengan kenyataan bahwasanya hal tersebut tidak semudah yang dipikirkan semula. Banyak diantara umat Islam menganggap bahwasanya Alquran dan hadis sebagai sesuatu yang siap saji sehingga apapun permasalahan dapat diberikan solusinya.

Kenyataannya kedua kitab suci umat Islam tersebut lebih banyak memuat prinsip-prinsip umum Islam sebagai nilai universal yang bisa memberikan inspirasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak jarang hukum yang dihasilkan oleh Barat lebih cocok dengan prinsip-prinsip kemaslahatan di dalam Islam, sehingga sebagian besar negara-negara Islam banyak yang mengadopsi hukum Barat di dalam konstitusi. Komposisi hukum Barat yang diadopsi tersebut tergantung dengan kadar kebutuhan mereka terhadap produk hukum tersebut, akan tetapi yang jelas hukum Barat telah mendominasi hukum di dalam konstitusi negara-negara Islam. Kalangan akademisi Muslim menyadari tidak mungkin bisa mewujudkan hukum Islam secara independen yang mengatur secara *holistic* kebutuhan terhadap hukum tanpa bantuan dari produk hukum Barat.

E. Membumikan Syari'at Secara Rasional.

Sejarah gemilang Islam masa lalu yang telah melahirkan hukum Islam pada zamannya telah menjadi momok dalam perumusan hukum Islam itu sendiri, mungkinkah merumuskan hukum Islam yang berasal dari bahan baku dari Barat. Kegamangan juridis di kalangan Islam muncul melihat kenyataan fakta di lapangan posisi marginal umat Islam dalam bidang *science* dan ilmu pengetahuan tidak memungkinkan bagi mereka menciptakan produk hukum yang independen. Langkah rasional yang dilakukan hanya sampai pada level islamisasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan Barat dengan melakukan filter yang sesuai dengan moral Islam.

Fakta nama Islam telah sering dibajak oleh mereka yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan stigma yang negatif di kalangan media terutama di negara-negara Barat.¹⁹ Sejarah perang salib di masa lampau seakan membangkitkan luka lama fanatisme

¹⁸ Juris Pupcenoks, *Democratic Islamization in Pakistan and Turkey' : Lessons for the Post - Arab Spring Muslim World*, (The Middle East Journal 66.2, Spring 2012), h. 273-289.

¹⁹ Michael G. Pelezt, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa/Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. *Indonesia* 80 (October 2005): h. 161-171.

agama yang terjadi di dalam sejarah akibat adanya gerakan radikal yang terjadi di masa kini. Gerakan radikal Islam yang muncul di daerah-daerah konflik di beberapa negara mayoritas Islam seakan memberi justifikasi bagi mereka yang memiliki bibit permusuhan untuk mengarahkan jarinya kepada Muslim secara keseluruhan. Bagi masyarakat di luar Islam mungkin tidak bisa disalahkan bila langsung menaruh kecurigaan secara umum kepada umat Islam setelah melihat fakta besarnya kekerasan sektarian yang berbau agama terjadi di negara-negara yang mayoritas Islam.

Sebenarnya munculnya gerakan radikal di kalangan umat Islam beberapa dekade terakhir ini akibat dari kondisi tertekan dari keadaan kronis yang dialami sehingga merasa ancaman identitas akan hilang. Klaim kesempurnaan Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia secara maksimal.²⁰

Sementara itu, sebagian golongan umat Islam masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu menimbulkan dampak hidup teralienasi dari kenyataan dunia yang berbeda. Golongan di luar Islam terkadang kurang bisa memahami kenapa umat Islam terkesan berbeda dengan masyarakat pada umumnya sehingga memerlukan perlakuan khusus bagi mereka. Konsep halal, perkawinan, dan hijab yang secara kasat mata dapat dilihat bagaimana masyarakat Islam itu berbeda. Belum lagi konsep adaptasi yang diartikan berbeda yang dalam banyak hal membuat sulitnya melakukan integrasi bagi bagi masyarakat Islam. Harus ada saling pengertian antara masyarakat Islam dengan komunitas lainnya sehingga dapat terus menjalin komunikasi yang konstruktif.

Munculnya pusat-pusat konsentrasi masyarakat Islam di beberapa negara Barat dalam beberapa hal menimbulkan reaksi yang beragam pula dari masyarakat di sekitar. Komunitas Muslim biasanya membuat suatu lingkungan yang *brand* Islam seperti Mesjid, *halal food square* hal tersebut *setting* wilayah di daerah tersebut relatif berbeda.²¹ Tentu saja sangat wajar bila ada resistensi dari mereka sebagai *host* di daerah itu yang merasa identitas dan wilayah mereka diinvasi. Sebenarnya perasaan yang sama juga dialami oleh umat Islam di Indonesia ketika daerah-daerah tertentu yang identik dengan daerah Islam mulai muncul banyak gereja-gereja di sana. Masyarakat lokal di Indonesia banyak melakukan manuver demi menggagalkan pembangunan bangunan-bangunan yang berbau Kristen, seperti gereja, maupun sekolah Kristen lainnya. Masalahnya harus ada usaha untuk memberikan pemahaman bahwasanya konsekwensi dari kehidupan global ini tidak memungkinkan suatu masyarakat mempertahankan homogenitas. Tentunya harus ada usaha untuk memahami kearifan lokal masyarakat mayoritas di sana yang tidak boleh melanggar nilai-nilai yang terdapat di masyarakat tersebut.

²⁰ Jay Solomon, *Radical Minority in Indonesia set Militant Islamic Agenda-Zealous Groups Emerge to Fill a Power Vacuum*, Asian Wall Street Journal, (Victoria, Hongkong: 11 December 2011), h. 1.

²¹ Nourafni Farlina Rahim, Zurina Shafi'I, and the others, *Awareness and Perception of Muslim Consumers on Non-Food Halal Product*, Journal of Social and Development Sciences, 4.10, October 2013), h. 478-487.

Ada semangat untuk memunculkan *spirit Indonesian Islam not Islam in Indonesia* melihat kenyataan bahwa ada pemahaman untuk menghargai nilai-nilai lokal yang sudah eksis ribuan tahun terlebih dahulu sebelum kedatangan Islam. Faktanya, dalam banyak hal dapat dilihat bahwasanya Islam di Indonesia lebih mengakomodir perbedaan dibanding dengan Islam di pusat awal penyebarannya di Timur Tengah. Bahkan ada hal-hal tertentu yang tidak dijumpai karena dianggap menyalahi prinsip-prinsip Islam di Indonesia dilaksanakan. Seperti menikah dengan berbeda keyakinan, ataupun tinggal serumah dengan mereka dalam satu keluarga dengan keyakinan yang berbeda khusus dengan ini sering dijumpai di Karo Sumatera Utara. Banyak lagi kegiatan-kegiatan peninggalan ajaran animisme diberi sentuhan dengan Islam dengan merubah sedikit format dengan membacakannya kata-kata mantranya digantikan dengan teks yang terdapat di dalam Alquran.²²

Kemandirian dalam berdemokrasi sangat diperlukan suatu bangsa untuk menatap masa depan yang lebih pasti, karena itu perlu adanya usaha yang cermat dalam menerima pengaruh dari luar. Intervensi politik, ekonomi maupun budaya biasanya terselubung dengan program bantuan yang dikucurkan suatu negara agar terlihat lebih santun dan tidak menimbulkan gejolak. Banyaknya program bantuan dari berbagai negara yang terlibat dalam problem sosial di Indonesia masing-masing memiliki misi yang berbeda. Usaid, Ausaid, maupun Japanese aid merupakan lembaga yang lazim memberikan bantuan di bidang *technical asistent* ataupun financial untuk tujuan masalah-masalah social. Akan tetapi, faktanya negara-negara yang memberikan bantuan tersebut sangat besar perannya dalam kegiatan investasi di Indonesia ataupun mengadakan hubungan dagang dengan negara ini.²³ Sementara itu, ada juga lembaga-lembaga tertentu biasanya dari negara-negara maupun perseorangan yang beraktivitas untuk mengembangkan paham keagamaan tertentu bagi masyarakat Muslim melalui jalur sosial pendidikan. Uniknya intervensi masalah keagamaan malah lebih sensitif dibandingkan dengan masalah politik maupun ekonomi karena langsung berhubungan dengan individu masing-masing.

Wajah Indonesian Muslim yang terefleksi dari kehidupan bermasyarakat baik secara formal maupun informal tampak lebih mengakomodir perbedaan dalam bingkai kenegaraan. Hal tabu membicarakan hal-hal SARA (suku, agama dan ras) yang bisa menyinggung keyakinan orang lain sehingga posisi Islam dan agama lainnya dianggap sama. Bahkan Konghucu di China hanya dianggap sebagai bentuk filsafat di Indonesia dianggap sebagai agama, artinya di tempat asalnya sendiri kurang begitu dihargai malah di Indonesia sebagai mayoritas Muslim terbesar di dunia mengakui Konghucu sebagai agama resmi.²⁴ Sikap tersebut membuat dinamika masyarakat Indonesia lebih attraktif karena banyak entitas

²² Danilyn Rutherford, *After Syncretism: The Anthropology of Islam and Christianity in Southeast Asia*, Comparative Studies in Society and History 44.1 (January 2002), h. 196-205.

²³ Elisabeth Shakman Hurd, *The Political Authority of Secularism in International Relations*, (European Journal of International Relations 10.2, Jun 2004), h. 235-262.

²⁴ Dru C. Gladney, *Islam in China: Accommodation or Separatism? The China Quarterly* 174 (March 1993), h. 451-467.

yang dibiarkan berkembang tanpa adanya halangan dari pemerintah. Pemerintah tentunya juga terlibat dalam masalah-masalah teknis yang mengatur hubungan antar masing-masing pemeluk agama, seperti ketentuan untuk membangun rumah ibadah harus mengikuti peraturan yang telah disepakati masing-masing pihak agama-gama yang diakui dengan pemerintah tentunya.

Merupakan hal yang lazim bagi pemimpin-pemimpin di Indonesia mulai dari level tertinggi sampai terendah untuk menghadiri kegiatan seremonial keagamaan dari pihak lain. Tidak heran bila seorang kepala negara yang Muslim membuka kegiatan natal bersama di suatu tempat, sementara di negara mayoritas Muslim lainnya dianggap tabu. Wajah Islam Indonesia yang cenderung lebih akomodatif dengan kepercayaan pihak lain dianggap sebagai aset dalam mempersatu kebhinekaan Indonesia. Itu sebab keutuhan Indonesia tetap terjaga ketika terjadi krisis ekonomi maupun politik tahun 1998 yang diperkirakan akan muncul *Balkanisasi* di Indonesia. Banyak pihak yang memperkirakan disintegrasi di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan karena banyaknya suku bangsa dan agama yang hidup terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Pola keislaman *Indonesian Muslim* sangat membantu dalam mewujudkan kemajemukan dijadikan aset untuk berkembang sehingga Indonesia sekarang termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling mengesankan di dunia. Akan tetapi, kelemahan bagi pola *Indonesian Islam* kurang memiliki ikatan emosional yang kuat dalam melakukan konsolidasi dalam menghadapi suatu masalah besar. Pengalaman sejarah mengajarkan bagaimana rapuhnya ikatan emosional masyarakat Muslim nusantara yang dianggap terlalu cair sehingga mudah diadu domba oleh penjajah Belanda selama 3,5 abad. Terlalu cairnya ikatan emosional yang ada masyarakat Indonesia sangat sulit melahirkan fasisme, akan tetapi energi sosial relatif lebih sulit pula untuk didorong untuk mencapai suatu target berskala besar. Politik bebas aktif yang dianut oleh pemerintah Indonesia sangat jelas menggambarkan filosofi masyarakat yang ingin bebas menentukan arah politiknya yang selama masa penjajahan mendapat tekanan yang kuat.

Indonesia merupakan tipikal bangsa yang kurang ekspansif dalam filosofi hidup. Refleksi dari terlalu cairnya hubungan emosional dari entitas di dalam masyarakat yang sangat mengakomodir heterogenitas. Masyarakat Indonesia lebih condong untuk menerima pengaruh dari manapun dengan melakukan mengkomunikasikan dengan nilai-nilai yang telah disepakati sebelumnya. Artinya bentuk muslim Indonesia akan terus mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi terkini masyarakatnya, sehingga agak sulit mendefinisikan dengan menggunakan parameter Sunni maupun Syiah.²⁵

Lihat saja wajah *frame* Islam yang tergambar dari kecenderungan elit mulai dari zaman kemerdekaan selalu mengikuti pola keislaman yang cenderung berubah sesuai

²⁵ Judy Gibbs Robinson, " 'Here, We are just Muslim' : Islam in Oklahoma Shiite and Sunni Overlook Differences to Come Together." *McClathcy – Tribune Business News* (Washington) 21 January 2007.

kondisi masyarakat. Bila pada awal kemerdekaan Indonesian Muslim digambarkan dengan penerimaan partai Masyumi sebagai *dominant player* menandakan Islam di Indonesia pada waktu itu memiliki kiblat Timur Tengah karena hubungan cukup erat dengan kalangan sana. Pada masa orde baru tampaknya Muhammadiyah yang lebih dekat dengan gerakan puritanisme lebih diakomodir oleh presiden Soeharto karena lebih dianggap cocok dalam mendukung program-program pembangunan.²⁶

Kalangan Nahdhiyyin yang memiliki massa lebih banyak kurang dihargai pada masa pemerintahan Soeharto karena dianggap masih memiliki pemikiran yang relatif tradisional. Keadaan berubah pasca reformasi 1998 tampaknya pemikiran NU yang sangat akomodatif dengan tradisi-tradisi lokal sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Banyak pemimpin-pemimpin saat ini yang memiliki afiliasi dengan NU karena ingin mendapatkan legitimasi masyarakat yang cukup besar dinegeri ini. Tipikal wajah *Indonesian Muslim* tidak bisa hanya didefinisikan dari aspek politik saja juga terkait dengan hal-hal baik itu, sosial kemasyarakatan. Memang ada juga asumsi negatif tentang Indonesian Muslim yang sangat sulit untuk keluar dari jebakan masalah suap karena dianggap sebagai bagian dari budaya. Penjajahan yang berlangsung sangat lama telah menciptakan *gesture* keagamaan maupun sosial berdampak negatif akibat tertekan secara ekonomi dan politik yang berimbas dalam sosial keagamaan.

Masyarakat sekuler yang cenderung untuk memberikan garis merah pembatasan antara urusan negara dengan agama lahir karena pengalaman buruk ketika institusi keagamaan dianggap sebagai penghalang dalam dinamika masyarakat. Manusia secara alami tidak bisa dikungkung dalam suatu penjara ideologis dogmatis karena memiliki akal untuk melakukan evaluasi terhadap keadaan yang ada sehingga penjara ideologis seharusnya dilepas. Masalahnya ialah latar belakang sekularisasi muncul untuk menghilangkan fanatisme ideologis telah melahirkan hal yang sama juga dengan lahirnya kediktatoran sekularisasi. Meningkatnya paham sekuler keagamaan di banyak negara merupakan antithesis terhadap paham sekuler yang dianggap telah membelenggu berkembangnya paham suatu agama. Bagi mereka paham teologis tidak seharusnya diperlakukan di belakang layar harus juga diberi kesempatan untuk berkembang untuk membentuk suatu identitas. Bahkan paham ekstrim yang muncul di beberapa negara tidak mengatas namakan seperti di beberapa negara. Superioritas paham sekuler telah menjelma menjadi ancaman bagi perkembangan ideologis keagamaan, hal tersebut dapat dilihat di negara-negara yang telah mempraktekkan sejak awal paham ini.

Demokrasi yang dipraktekkan di dalam masyarakat masih dalam tataran euphoria dalam menyalurkan ekspresi kepada pihak penguasa. Kenyataannya euphoria demokrasi banyak dimanipulasi dengan kepentingan kaum pemodal yang sangat jauh dari cita-cita pemerataan kue ekonomi nasional. Pasca reformasi keran keterbukaan di mulai, akan tetapi *gap* antara yang kaya dan miskin makin melebar yang mengindikasikan demokrasi sering

²⁶ Keith Sutter, *Indonesia: The End of Suharto's Era, Contemporary Review* (September 2008, h. 120-124).

dibajak oleh kaum pemodal dalam menggolkan kepentingan kelompok mereka.²⁷ Fakta besarnya *cost* politik yang dikeluarkan orang yang hendak maju dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah tidak seimbang dengan gaji resmi yang akan mereka terima ketika berhasil menduduki jabatan tersebut. Hal itu menimbulkan kecurigaan publik terhadap motivasi penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh mereka ketika menjabat. Fakta banyaknya anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah yang tertangkap komisi pemberantas korupsi memperkuat dugaan penyelewengan itu. Di tambah lagi sejumlah kepala daerah yang divonis bersalah dalam masalah korupsi menambah turunnya tingkat kepercayaan kepada mereka dalam mengemban amanah rakyat. Akan tetapi, peran masyarakat juga turut membantu menciptakan koruptor-koruptor baru akibat keharusan dalam menggunakan *money politics* dalam setiap hajatan pesta rakyat dalam pemilihan umum.

Jargon politik islam semakain tidak laku di indoensia karena banyaknya tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan partai poltik yang berbasis Islam terlibat dnegan kasus-kasus korupsi sehingga menimbulkan sikap apatis terhadap *tagline* hukum Islam atau partai Islam.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sebenarnya telah mengambil inisiatif yang lebih besar dalam mengembangkan paham sekulerisasi dibandingkan dengan peran negara. Karena mereka sendiri yang memberikan batasan yang jelas wilayah sakral yang berbau agama dengan profan yang berkaitan dengan politik. Masyarakat telah melihat banyaknya pihak yang mengatas namakan agama untuk kepentingan pribadi dan golongan, hal ini membuat mereka mengambil sikap dalam menentukan batasan yang jelas wilayah sakral maupun profan. Sikap masyarakat Indonesia yang apriori terhadap jargon politik Islam dapat dilihat kurang antusiasnya masyarakat terhadap figur tokoh agama yang terjun ke dunia politik. Apresiasi masyarakat terhadap tokoh agama tertentu tidak sebanding dengan kepercayaan masyarakat ketika mereka terjun ke dunia politik.

Bagi masyarakat Islam terlalu suci untuk dibawa dalam politik yang terlanjur diasumsikan dengan kamufase keburukan dalam bingkai kebaikan yang dianggap sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Masyarakat sebagai *voters* dalam setiap pemilihan di Indonesia tampaknya telah bertindak sebagai hakim dalam menentukan arah politik bangsa telah memutuskan tidak mendukung politik Islam dalam konstitusi. Peran Islam (agama) harus dipisahkan denagn kegiatan pilitik kenegaraan yang dianggap penuh intrik kekuasaan yang jauh dari ajaran normatif yang diajarkan.

Sekulerisasi yang berlangsung di Indonesia lebih banyak mengalir dari masyarakat menyikapi fakta politik yang sering sekali jauh dari nilai-nilai noramatif Islam. Islam dan

²⁷ Budi Utomo, Purwa K Sucahya, and the Others, " 'Priorities and Realities': Addressing the Rich – Poor Gaps in Health Status and Service Access in Indonesia." *International Journal for Equality in Health*, 10 (2011): h. 47.

politik kenegaraan adalah dua hal yang relatif berbeda bila dilihat dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia lebih cocok menempatkan politik Islam bukan sebagai *player* tetapi lebih condong sebagai *inspiratory* hukum maupun politik.²⁸ *Inspiratory* hukum dan politik selama ini kurang begitu digarap secara serius di kalangan akademisi Islam dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kontekstualisasi ajaran Islam yang terdapat di dalam teks nash jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat secara umum dari pada hanya sibuk untuk mengurus masalah-masalah yang kurang substansi. Fakta ada beberapa negara yang mendeklasifikasi sebagai negara yang berazaskan Islam, akan tetapi dari ekonomi, politik maupun keamanan negaranya sendiri masih jauh dari standar yang diharapkan. Bukan saja masih jauh dari kemakmuran bahkan rasa aman yang merupakan hak azasi setiap manusia tidak di dapatkan karena tinggi angka pembunuhan yang dilakukan dnegan pemboman.

Munculnya keinginan pihak untuk melakukan formalisasi Islam ke dalam konstitusi disebabkan oleh kenyataan Islam kurang dihargai di dalam kontitusi negara di Indonesia. Dasar negara pancasila lahir dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular dianggap sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi inspirasi lahirnya pemikiran demokrasi pancasila di Indonesia.²⁹ Bagi sebagian Muslim di Indonesia menjadikan karya Sutasoma sebagai insprator lahirnya pancasila semacam batu sandungan karena Islam dianggap bukan sebagai *locust* utama lahirnya falsafah negara. Adanya usaha untuk tidak menjadikan pancasila sebagai azas tunggal diterangi oleh usaha untuk menjadikan Islam juga sebagai dasar negara sehingga akan memudahkan untuk mengadopsi syariah ke dalam hukum formal. Kontekstualisasi syariah di negara sekuler di Indonesia merupakan suatu keniscayaan agar dapat menciptakan keseimbangan antara tuntutan untuk mengedepankan pluralitas juga menyerap aspirasi umat Islam. Keseimbangan itu harus tetap dijaga agar menimbulkan harmonisasi di dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat melahirkan energi positif dalam bernegara. Masalah utama munculnya separatisme di masa lalu mengajarkan bahwasanya aspirasi untuk mengadopsi Islam sebagai *locust* utama dasar negara sehingga mereka merasa tidak dipinggirkan oleh sistem yang ada. Sekarang bagaimana melakukan kontekstualisasi syariah ke sistem sekuler yang tidak menimbulkan gejolak malah bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Tentunya usaha yang dilakukan dengan mengestrak hukum Islam yang berdimensi universal yang bisa mengisi kekurangan hukum sekuler selama ini.

Hukum konvensional yang dikenal selama ini masih kering dengan dimensi keadilan yang terlihat banyaknya protes sosial terhadap penetapan hukum suatu kasus, di sini hukum Islam dapat memberi warna terhadap sisi keadilan ini. Banyak kasus-kasus hukum di dalam Islam yang dapat memberi pencerahan dalam mengati masalah kurangnya rasa

²⁸ Ahmet Kuru, "A Research Note on Islam, Democracy, Secularism." *Insight Turkey* 11.4 (2009), h. 29-40.

²⁹ Fred Rhodes, "Islam and Secularism in Middle East." *Middle East* 306, November 2000, h. 43.

keadilan di dalam masyarakat. Penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh segelintir orang terasah sudah menjadi masalah besar bagi masyarakat, bagaimana kontribusi hukum Islam terhadap persoalan ini sangat dihargai. Dalam kasus tanah yang terlantar oleh pemiliknya hukum Islam secara tegas mengatakan bagi siapa saja yang mengelolah tanah yang terlantar maka lahan tersebut menjadi miliknya. Artinya legalitas kepemilikan yang menyangkut kepentingan umum bisa dikalahkan demi kemaslahatan yang lebih besar. Hukum Islam memandang kesempatan untuk menikmati fasilitas untuk kepentingan umum harus lebih didahulukan demi terciptanya harmonisasi yang lebih baik. Sekarang masalahnya bagaimana mengukur suatu lahan tersebut dikategorikan sebagai “telantar” tentunya memerlukan penetapan hukum formal yang baku.

F. Penutup

Wajah Islam nusantara lebih banyak mencerminkan penyatuan heterogenitas entitas dalam bingkai sekularisme yang telah diadaptasi dengan realitas masyarakat. Merupakan suatu kemustahilan untuk menampilkan bentuk warna Islam Formalisasi syariat Islam tampaknya sangat jauh dari kenyataan selain pengalaman sejarah yang kurang mendukung juga kondisi ril masyarakat Indonesia mayoritas lebih nyaman dengan kondisi sekuler. Walaupun selalu ada kekuatan dari internal umat Islam yang berusaha untuk melakukan formalisasi syariat Islam terbukti banyaknya bermunculan Perda syariat di daerah-daerah akibat dari otonomi. Akan tetapi, Perda syariat yang selama ini ada lebih banyak untuk pencitraan untuk masyarakat demi kepentingan politik. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat bukan hanya sekedar *lip service* semata tetapi dengan melakukan pembenahan di segala lini untuk menampilkan pemerintahan yang bersih yang bisa memakmurkan masyarakat.

Masyarakat Indonesia tanpa ada intervensi politik sekalipun lebih condong untuk melakukan proses sekulerisasi secara alami. Artinya prinsip sekularisasi dianggap sebagai kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masyarakat Perancis yang melakukan sakralisasi prinsip sekuler sehingga menciptakan agama baru dalam bentuk formalisasi sekularisasi. Ketika prinsip sekulerisasi menghalangi orang untuk menampilkan identitasnya seperti dalam bentuk pelarangan pemakaian hijab. Padasarnya prinsip kebebasan yang diagungkan dalam sekulerisasi sudah hilang yang ada lahirnya bentuk kekultusan otoriter baru walaupun dengan nama yang manipulatif. Terbentuknya undang-undang perkawinan, zakat menimbulkan tafsiran sekulerisasi ala Indonesia yang mengakomodir hukum Islam terutama yang dapat mengatur ketertiban masyarakat. Kalangan akademisi Muslim di Indonesia telah menyadari bahwasanya Islam sangat tidak mungkin untuk menerapkan syariat Islam secara vulgar karena itu perlu adanya politik hukum yang cermat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmet Kuru, *A Research Note on Islam, Democracy, Secularism, Insight Turkey* 11.4, 2009.
- Budi Utomo, Purwa K Suahya, and the Others, *Priorities and Realities : Addressing the Rich – Poor Gaps in Health Status and Service Access in Indonesia.*” *International Journal for Equality in Health*, 10 2011.
- Christopher A Callaway, *Keeping Score’ : The Consequential Critique of Religion*, *International Journal for Philosophy of Religion* 70.3, December 2011.
- Danilyn Rutherford, *After Syncretism : The Anthropology of Islam and Christianity in Souteast Asia*, *Comparative Studies in Society and History* 44.1, January 2002.
- David Pinault, Commonweal, “Pray Only to Allah.” Vol. 139 issue 16 *Data Base: Literary Reference Centre*, September 2012.
- Diana Steigerwald, *Freedom and Orthodoxy’ : Islam and Difference in a Post – Andalusian Age*, *Canadian Journal of History* 41.1, Summer 2006.
- Doran C French, Urip Purwono and the Others, *Friendship and Religiosity of Indonesian Muslim Adolescents*, *Journal of Youth and Adolescence* 40.12 December 2011.
- Dru C. Gladney, *Islam in China : Accommodation or Separatism? The China Quarterly* 174, March 1993.
- Elisabeth Shakman Hurd, *The Political Authority of Secularism in International Relations*, *European Journal of International Relations* 10.2 , Juni 2004.
- Fred Rhodes, *Islam and Secularism in Middle East*, *Middle East* 306 November 2000.
- Hafiz Abdul Ghani, *Condition of Valid Custom in Islamic and Common Laws*, *International Journal of Business and Social Science* 3.4, February 2004.
- Hary C Triandis, *Culture and Self – Deception’ : A Theoretical Perspective.*” *Social Behavior and Personality* 39.1, 2011.
- Henry Munson, *Religion and State : The Muslim Approuch to Politics / Islam and Secularism in Middle East*, *The Middle East Journal* 55.3, Summer 2001.
- Ibnu Anshori, “ ‘Mustafa Kemal and Sukarno’ : Comparison of View Regarding Relation Between State and Religion.” *Master Abstract International* issue 02 Vol. 34, April 1996.
- Jay Solomon, *Radical Minority in Indonesia set Militant Islamic Agenda-Zealous Groups Emerge to Fill a Power Vacuum*, *Asian Wall Street Journal*, Victoria, Hongkong, 11 December 2011.

- Judy Gibbs Robinson, " 'Here, We are just Muslim' : Islam in Oklahoma Shiite and Sunni Overlook Differences to Come Together." *McClathcy – Tribune Business News* (Washington) 21 January 2007
- Juris Pupcenoks, *Democratic Islamization in Pakistan and Turkey' : Lessons for the Post - Arab Spring Muslim World*, *The Middle East Journal* 66.2 , Spring 2012.
- Keith Sutter, " 'Indonesia' : The End of Suharto's Era." *Contemporary Review*, September 2008.
- Lydia Smith, *Consider the Impact of Rape on Child : Paedophiles must Spend longer in Jail*, (London: Open Democracy, 2012).
- M Harper, *Conflict Today and Its Demands on International Society, Disaster Prevention and Management* 4.1, 1995.
- Madinier, Remy and the others, " 'The Politics of Religion in Indonesia' : Syncretism, Orthodoxy, and Religion Contention in Java and Bali." *Routledge Comtemporany Souteast*, 2011.
- Marilyn Porter, Tita Marlita Hasan, *Exploring in Narative Research: Indonesian Study*, *The Canadian Review of Sociology and Anthropology* 40.2 (May 2003): 153-170.
- Mark Woodward, *Java, Indonesia and Islam in Muslim Global Series* Dordrecht: Springer, 2010.
- Michael G. Pelezt, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa/ Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, *Indonesia* 80, October 2005.
- Murial Mc Gregor, *Letter: Religious Freedom is not Denial of Secularism* Carlsbad: University Wire, 2004.
- Nader A Hashemi, " 'Inching Towards Democracy' : Religion and Politics in Muslim World." *Third World Quarterly issue* 3 June 2003.
- Nourafni Farlina Rahim, Zurina Shafi'I, and the others, "Awareness and Perception of Muslim Consumers on Non-Food Halal Product." *Journal of Social and Development Sciences* 4.10, October 2013.
- Olle Tornquist, *Dynamic of Indonesia Democratisation.*" *Third World Quarterly*, June 2000.
- Robert Hefner, *Multiful Modernities' : Christianity, Islam, and Hinduism in Globalizing Age. Annual Review of Anthropology* 27, 1998.
- Robert Hefner, "Global Violence and Indonesian Muslim Politics." *American Anthropologist* 104.3 (September 2002): 754-765).

- Semiha Topal, *Every Body Wants Secularism' : But Which One ? Contesting Definitions of Secularism in Contemporary Turkey.*" *International Journal of Politics, Culture and Society* 25. 1-3 (September 2012): 1-14.
- Sevim Kalyoncu, *The Veiling Issue, Official Secularism and Popular Islam in Modern Turkey.*" *Journal of Muslim Minority Affairs* 19.2 (October 1999): 346-347.
- Tariq Madood, *2011 Paul Hanly Furfey Lecture' : Is There a Crisis of Secularism in Western Europe ?* *Sociology of Religion* 73.2, Summer 2012.



AS-SÂ'IS

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI)
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

ISSN 2338-1299



9 772338 129999